



**SALINAN**

**BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KODE KLASIFIKASI ARSIP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GROBOGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa arsip dapat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa arsip berperan sebagai identitas dan jati diri bangsa serta sebagai memori, acuan, dan media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, terdapat perubahan kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Grobogan Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan kearsipan di Daerah.
6. Arsip adalah rekaman suatu kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
8. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
9. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis meliputi LKD, Unit Kearsipan, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah,

Desa/Kelurahan, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan/ atau perseorangan.

11. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip Dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusutan.
12. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian Arsip Statis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
13. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi Arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung dan dicari oleh LKD serta diumumkan kepada publik.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja dan Pencipta Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Arsip Dinamis.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. menciptakan keseragaman Kode Klasifikasi dalam pengelolaan dan pengelompokan Arsip di Daerah;
  - b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya sinkronisasi informasi kearsipan Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi; dan
  - c. mewujudkan tertib Arsip sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

### BAB II

#### PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

#### Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
  - a. fungsi fasilitatif; dan
  - b. fungsi substantif.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 22 Nopember 2023  
BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd.

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 22 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap ttd.

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

  
RIADQA FRIAMBODO, SH  
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP

KODE KLASIFIKASI ARSIP

A. KLASIFIKASI ARSIP

1. Klasifikasi arsip digunakan untuk kemudahan dalam pengurusan surat (surat masuk dan surat keluar), pemberkasan arsip, penemuan kembali arsip dan pemanfaatannya sebagai sarana penyusutan arsip;
2. Klasifikasi arsip disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam klasifikasi arsip;
3. Sesuai dengan sifat decimal, arsip dikelompokkan dalam 10 pokok masalah atau urusan, diberi kode 000 s/d 900. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas substantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang).

Dengan demikian, sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya.

Sepuluh kelompok klasifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut :

000	Umum
100	Pemerintahan
200	Politik
300	Keamanan dan Ketertiban
400	Kesejahteraan Rakyat
500	Perekonomian
600	Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
700	Pengawasan
800	Kepegawaian
900	Keuangan

B. KODE KLASIFIKASI ARSIP

1. Kode sebagai alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, disamping itu juga sebagai alat penentu, dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan. Kode ini juga menunjukkan adanya urutan sistimatis dari masalah-masalah arsip yang dikelompokkan dalam 10 pokok masalah atau urusan dan kartu kendali dalam file.
2. Untuk menggunakan kode klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antara masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dengan prinsip berjenjang.

Contoh :

100	Pemerintahan
100.3	Hukum
100.3.1.1	Program Legislasi

3. Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang paling tepat harus dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandangan mana masalah dalam surat tidak selalu mudah, pada umumnya "perihal" surat yang dicantumkan dibagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan

masalah surat, tetapi kerap kali “perihal” tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode.

4. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar, bahwa itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.

### C. PERINCIAN KODE KLASIFIKASI ARSIP

000	UMUM
000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
000.1.1	Telekomunikasi
000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri
000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD
000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri
000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD
000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)
000.1.5	Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
000.1.6	Penyediaan Konsumsi
000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas
000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan
000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape
000.1.8.2	Penghijauan
000.1.8.3	Perbaikan Gedung
000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor
000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman
000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan
000.1.9.2	Pemasangan
000.1.10	Ketertiban dan Keamanan
000.1.10.1	Pengamanan,
000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan
000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir
000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

000.2	PERLENGKAPAN		
	000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan	
		000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
		000.2.2.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
	000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor	
		000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor
		000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
000.2.3	Distribusi		
	000.2.3.1	Barang habis pakai	
	000.2.3.2	Barang milik daerah	
	000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan	
	000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	
000.3	PENGADAAN		
	000.3.1	Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)	
	000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	
	000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	
	000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	
	000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa	
	000.3.6	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi	
000.4	PERPUSTAKAAN		
	000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	000.4.2	Deposit Bahan Pustaka	
		000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
		000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
		000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
		000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
		000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
	000.4.3	Koleksi Pustaka	
		000.4.3.1	Pembelian
		000.4.3.2	Hibah
		000.4.3.3	Hadiah
000.4.3.4		Tukar Menukar	
000.4.3.5		Implementasi Undang-Undang KCKR	
	000.4.3.6	Terbitan Internal	

		000.4.3.7	Pendistribusian
		000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
	000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka	
	000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi	
	000.4.6	Layanan Perpustakaan	
		000.4.6.1	Keanggotaan
		000.4.6.2	Peminjaman
		000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
	000.4.7	Kerjasama Perpustakaan	
		000.4.7.1	MoU
		000.4.7.2	Perjanjian kerjasama
		000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
	000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan	
		000.4.8.1	Pengembangan situs web
		000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
		000.4.8.3	Pengembangan
		000.4.8.4	Pengembangan
	000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	
	000.4.10	Konservasi	
		000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
		000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
		000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
	000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	
	000.4.12	Transformasi Digital	
	000.4.13	Kurasi Digital	
	000.4.14	Pengembangan Perpustakaan	
		000.4.14.1	Perpustakaan Umum
		000.4.14.2	Perpustakaan Khusus
		000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah
		000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi
000.5	KEARSIPAN		
	000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	000.5.2	Pembinaan Kearsipan	
		000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
		000.5.2.1	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
		000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
		000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain
		000.5.2.5	Data Base Arsiparis
		000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
		000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
		000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi

		000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
		000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
		000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
	000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis	
		000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
		000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
		000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)
		000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)
		000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis ( antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)
	000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)	
	000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga ( antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerah-an Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga	
	000.5.6	Penyusutan Arsip	
		000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
		000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan
		000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
	000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)	
	000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis	
		Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	
		Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	
	000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis	

		000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan)
		000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
		000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkrip)
		000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis ( antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
		000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
		000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
		000.5.9.7	Preservasi Kuratif
		000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)
		000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
		000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)
		000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN
		000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
		000.5.13	Penyelamatan
		000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
		000.5.15	Pengawasan Kearsipan
		000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
		000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
		000.5.15.3	Sanksi
000.6	<b>PERSANDIAN</b>		
	000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	000.6.2	Pengamanan persandian	
		000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi
		000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi
		000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
	000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi	
		000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian
		000.6.3.2	Administrasi Pengkajian
		000.6.3.3	Pelaksanaan
		000.6.3.4	Pelaporan
	000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian	
		000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)
		000.6.4.2	Jaring Komunikasi
	000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik	

		000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
		000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
		000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
		000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
		000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
		000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
		000.6.5.7	Pelaporan
000.7	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>		
	000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/ Musrenbang	
		000.7.1.1	Musrenbang Provinsi
		000.7.1.2	Musrenbang Nasional
		000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota
		000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
		000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
		000.7.1.6	Musrenbang Desa
	000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah	
		000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
		000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
		000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
		000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
		000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
		000.7.2.6	Program kerja tahunan
		000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
		000.7.2.8	Laporan Berkala
		000.7.2.9	Laporan Insidental
		000.7.2.10	Evaluasi Program
	000.7.3	Koordinasi	
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	
	000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	
	000.7.6	Aksi Strategis Daerah	
		000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
		000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
		000.7.6.3	Sosisialisasi dengan Perangkat Daerah
		000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
		000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan	
		000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
		000.7.7.2	Pendanaan Daerah
		000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
		000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
		000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
000.8	<b>ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b>		
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah	
		000.8.1.1	Pembentukan
		000.8.1.2	Pengubahan
		000.8.1.3	Pembubaran

	000.8.2	Uraian Jabatan	
		000.8.2.1	Analisa Jabatan
		000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
	000.8.3	Ketatalaksanaan	
		000.8.3.1	Proses Bisnis
		000.8.3.2	Standar Pelayanan
		000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
		000.8.3.4	Pelayanan Publik
	000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	
	000.8.5	Evaluasi Kelembagaan	
	000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi	
		000.8.6.1	Budaya Kerja
		000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
		000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
000.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN		
	000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	
	000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi	
	000.9.3	Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan	
	000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	
	000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
	000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
		000.9.6.1	Data
		000.9.6.2	Statistik
		000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
	000.9.7	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
	000.9.8	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	
	000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	
	000.9.10	Seminar, lokakarya, temukarya, workshop	
100	PEMERINTAHAN		
100.1	OTONOMI DAERAH		
	100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	
	100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	
	100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	
		100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
		100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
		100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan

		100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
		100.1.4.5	Assosiasi Daerah
	100.1.5	Otonomi khusus dan daerah istimewa	
	100.1.6	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	
		100.1.6.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		100.1.6.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
		100.1.6.3	Pengembangan Kapasitas Daerah
	100.1.7	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	
100.2	PEMERINTAHAN UMUM		
	100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama	
		100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
		100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
		100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
		100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan
		100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan	
		100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
		100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
		100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
		100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
100.3	HUKUM		
	100.3.1	Program Legislasi	
		100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
		100.3.1.2	Program Legislasi
	100.3.2	Rancangan Peraturan	
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	
		100.3.3.1	Keputusan / Ketetapan Gubernur
		100.3.3.2	Keputusan / Ketetapan Bupati
		100.3.3.3	Keputusan / Ketetapan Walikota
		100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
		100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
		100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
	100.3.4	Instruksi / Surat Edaran	
		100.3.4.1	Instruksi / Surat Edaran Provinsi
		100.3.4.2	Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
		100.3.4.3	Instruksi / Surat Edaran Kota
		100.3.4.4	Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II
	100.3.5	Surat Perintah	
		100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
		100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
		100.3.5.3	Surat Perintah Walikota

		100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
	100.3.6	Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis	
	100.3.7	Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama	
		100.3.7.1	Dalam Negeri
		100.3.7.2	Luar Negeri
	100.3.8	Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	
	100.3.9	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum	
	100.3.10	Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
	100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum	
		100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
		100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
		100.3.11.3	Tata Usaha Negara
		100.3.11.4	Perburuhan
		100.3.11.5	Arbitrase
		100.3.11.6	Sengketa Adat
	100.3.12	Perijinan	
	100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	
		100.3.2.1	Hak Cipta
		100.3.2.2	Hak Paten
		100.3.2.3	Hak Desain Industri
		100.3.2.4	Hak Rahasia Dagang
		100.3.2.5	Hak Merk
	100.3.14	Permohonan HAKI yang ditolak	
<b>200</b>	<b>POLITIK</b>		
<b>200.1</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
	200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
		200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
		200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
		200.1.2.3	Bela Negara
		200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
		200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
	200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
		200.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
		200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan

		200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
		200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
		200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
	200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Masyarakat	
		200.1.4.1	Ketahanan Seni
		200.1.4.2	Ketahanan Budaya
		200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
		200.1.4.4	Organisasi Masyarakat
		200.1.4.5	Masalah Sosial Masyarakat
		200.1.4.6	Fasilitasi
		200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
		200.1.4.8	Laporan
		200.1.4.9	Evaluasi
		200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
		200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
	200.1.5	Politik Dalam Negeri	
		200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
		200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
		200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
		200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
		200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
		200.1.5.6	Pemerintah Daerah
		200.1.5.7	Database Parpol
		200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
		200.1.5.9	Pemilihan Umum
	200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
		200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
		200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
		200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
		200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
200.2	PEMILU		
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	
		200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
		200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
		200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
		200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)

	200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
	200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
	200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual
200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
	200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
200.2.5	Pencalonan Pemilu	
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6	Kampanye Pemilu	
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
200.2.7	Dana Kampanye	
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara	
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
	200.2.8.2	Master surat suara
	200.2.8.3	Surat-surat yang terpakai
	200.2.8.4	Surat suara tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
	200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu	
200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu	

		200.2.10.1	Surat-surat mengenai perselisihan hasil Pemilu
		200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
		200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
		200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu
<b>300</b>	<b>KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>		
<b>300.1</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		
	300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	
	300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja	
		300.1.2.1	Tata Operasiona Polisi Pamong Praja
		300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
	300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	
	300.1.4	Perlindungan Masyarakat	
	300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	
<b>300.2</b>	<b>PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN</b>		
	300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan	
		300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
		300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
		300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
		300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
		300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
		300.2.2.6	Registrasi BEACON
	300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan	
	300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan	
		300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan
		300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
		300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
		300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
		300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan	
	300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	
	300.2.8	Operasi Komunikasi	
		300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
		300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
		300.2.8.3	Registrasi BEACON

	300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan
	300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi
	300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi
	300.2.12	Pelaporan dan Evaluasi
	300.2.12.1	Laporan Harian
	300.2.12.2	Laporan Bulanan
	300.2.12.3	Laporan Tahunan
	300.2.12.4	Evaluasi
<b>400</b>	<b>KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	
<b>400.1</b>	<b>PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL</b>	
	400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.1.2	Pembangunan Sumber Daya
	400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
	400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi
	400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
	400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.3	Peningkatan Infrastruktur
	400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
	400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
	400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
	400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal

	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
	400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
	400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan
	400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus
	400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
	400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
	400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
	400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
	400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
	400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
	400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
400.2	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
	400.2.2.1	Data gender
	400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
	400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
	400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
	400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
	400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
	400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender
	400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu

	400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)	
	400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	
	400.2.4.2	Data perlindungan anak	
	400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi	
	400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	
	400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	
	400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)	
	400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak	
	400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak	
	400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak	
	400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi	
	400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	
	400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	
	400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	
	400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	
	400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	
	400.3	PENDIDIKAN	
	400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal		
	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	
	400.3.2.2	Pelatihan Sosial	
	400.3.2.3	Peringatan Hari anak	
	400.3.2.4	Block Grant	
400.3.3	Pendidikan Masyarakat		
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program	
	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial	
	400.3.3.3	Pembinaan Program	
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan	
	400.3.3.5	Pameran	
	400.3.3.6	Rakor	
	400.3.3.7	Sosialisasi	
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi	
400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik		
400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama		
	400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	

	400.3.6.2	Block Grant
	400.3.6.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
	400.3.6.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
	400.3.6.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
	400.3.6.6	Bantuan Siswa Miskin
400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus	
	400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
	400.3.6.2	Block Grant
	400.3.6.3	Lomba, festival
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.6.5	Pendataan
	400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
	400.3.7.7	Block Grant
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan Ajar
	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	Block grant
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.8.6	Lomba, Sayembara, festival
	400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan ajar
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis
	400.3.9.3	Block grant
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.10.3	Sertifikasi Guru
	400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
	400.3.10.5	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik

		400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
		400.3.10.7	Block grant
		400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.11	Penilaian Pendidikan	
		400.3.11.1	Penilaian Akademik
		400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
		400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
	400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan	
		400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
		400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
	400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan	
		400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
		400.3.13.2	Sarana Pendidikan
		400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
400.4	KEOLAHRAGAAN		
	400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan	
		400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
		400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
		400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi	
		400.4.3.1	Olahraga Massal
		400.4.3.2	Olahraga Tradisional
		400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata
	400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga	
		400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
		400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
		400.4.4.3	Olahraga Prestasi
		400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
	400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	
		400.4.5.1	Olahraga Tradisional
		400.4.5.2	Layanan Khusus
	400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	
		400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
		400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
	400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga	
		400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
		400.4.7.2	Kompetisi
		400.4.7.3	IPTEK Olahraga
	400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	
		400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
		400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
	400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga	
		400.4.9.1	Industri Olahraga
		400.4.9.2	Promosi Olahraga
	400.4.10	Olahraga Prestasi	

		400.4.10.1	Daerah
		400.4.10.2	Nasional
		400.4.10.3	Internasional
	400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	
		400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
		400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
		400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga
400.5	KEPEMUDAAN		
	400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	
		400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
		400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
		400.5.2.3	Pengembangan
	400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda	
		400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
		400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
		400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
	400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda	
		400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
		400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
		400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
	400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)	
		400.5.5.1	Pengkajian
		400.5.5.2	Pengembangan
		400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
	400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	
		400.5.6.1	Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
		400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
	400.5.7	Kewirausahaan	
		400.5.7.1	Kelembagaan
		400.5.7.2	Pengaderan
		400.5.7.3	Perintisan
	400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	
		400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
		400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
		400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
		400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
	400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	
		400.5.9.1	Standardisasi
		400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
	400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	
		400.5.10.1	Kemitraan

		400.5.10.2	Penghargaan Pemuda	
400.6	KEBUDAYAAN			
	400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman		
		400.6.2.1	Registrasi Nasional	
		400.6.2.2	Pelindungan	
		400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan	
		400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi	
	400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman		
		400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan	
		400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa	
		400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	
		400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi	
	400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya		
		400.6.4.1	Sejarah	
		400.6.4.2	Pemetaan nilai	
		400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai	
		400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi	
		400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	
		400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah	
	400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya		
		400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya	
		400.6.5.2	Kekayaan budaya	
		400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia	
		400.6.5.4	Diplomasi budaya	
	400.7	KESEHATAN		
		400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar	
400.7.2.1			Pelayanan kedokteran keluarga	
400.7.2.2			Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	
400.7.2.3			Pelaksanaan kesehatan primer	
400.7.2.4			Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	
400.7.2.5			Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	
400.7.2.6			ICD 10, Destistry & Stomatology	
400.7.2.7			Infeksi menular lewat transfusi darah	
400.7.2.8			Penyakit mulut di tingkat primer	
400.7.2.9			Pembiayaan darah	
400.7.2.10			Penggunaan darah rasional	
400.7.2.11			Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	
400.7.2.12			Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	
400.7.2.13			Akreditasi puskesmas	
400.7.2.14		Puskesmas berprestasi		
400.7.3		Upaya Kesehatan Rujukan		
		400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan	
	400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)		
	400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat		

400.7.4	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
	Keperawatan dan keteknisian medic	
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
	400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan
400.7.5.1		Mikrobiologi dan imunologi
400.7.5.2		Patologi dan toksilologi
400.7.5.3		Radiologi
400.7.5.4		Perizinan dan sertifikasi
400.7.5.5		Sarana dan prasarana kesehatan
400.7.5.6		Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.5.7		Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra
400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung	
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkulosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang	
	400.7.9.1	Pengendalian malaria

	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular	
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
	400.7.10.3	Penyakit kanker
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11	Penyehatan lingkungan	
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12	Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	
400.7.13	Gizi	
	400.7.13.1	Gizi makro
	400.7.13.2	Gizi mikro
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
400.7.14	Kesehatan ibu	
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga berencana
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15	Kesehatan anak	
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga	
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2	Kapasitas kerja
	400.7.17.3	Lingkungan kerja
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga
400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan	

	400.7.18.1	Harga obat publik
	400.7.18.2	Pengadaan obat
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan	
	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20	Kefarmasian	
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
400.7.26	Kesehatan Haji	
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
400.7.27	Promosi Kesehatan	
	400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
	400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
	400.7.27.4	Hari Kesehatan
400.7.28	Data dan Informasi	
	400.7.28.1	Statistik kesehatan

		400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
		400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
	400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
		400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
		400.7.29.2	Standarisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
		400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
		400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
	400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
		400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
		400.7.30.2	Standarisasi produk pangan
		400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
		400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
		400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
	400.7.31	Rekam Medis	
400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN		
	400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.8.2	Fasilitasi	
		400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
		400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
		400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
		400.8.2.4	Kasus Keagamaan
		400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
	400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	
		400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan
		400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
		400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
		400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
		400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	SOSIAL		
	400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak	
		400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
		400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
		400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
		400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
		400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
	400.9.3	Rehabilitasi Sosial	
		400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
		400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial

	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
	400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
		Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia	
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
	400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
	400.9.10.4	Kerjasama
400.9.11	Jaminan Sosial	
	400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
	400.9.11.4	Kerjasama
400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial	
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	
	400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
	400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
	400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi

		400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
		400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
	400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	
		400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
		400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
		400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
		400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
		400.9.14.5	Bantuan Langsung
		400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
	400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
		400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
		400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
		400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial
		400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan
400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
	400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
		400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
		400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
		400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
		400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa
	400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	
		400.10.3.1	Lembaga Masyarakat
		400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif
		400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
		400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
		400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
	400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	
		400.10.4.1	Budaya Nusantara
		400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan
		400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial
		400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan
	400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat	
		400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan
		400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
		400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran
		400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
		400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
	400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	
		400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
		400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan

		400.10.6.3	Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan
		400.10.6.4	Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
		400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
	400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	
400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN		
	400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.11.2	Pertamanan	
		400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan
		400.11.2.2	Taman Kota
		400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota
	400.11.3	Pemakaman	
		400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman
		400.11.3.2	Pemakaman
		400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman
	400.11.4	Jalur Hijau	
		400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau
		400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan
		400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
	400.11.5	Peran Serta Masyarakat	
	400.11.6	Pengawasan dan Penindakan	
	400.11.7	Pengelolaan Data	
	400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	
400.12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.12.2	Pendaftaran Penduduk	
		400.12.2.1	Identitas Penduduk
		400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
		400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara
		400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan
		400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.3	Pencatatan Sipil	
		400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian
		400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian
		400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
		400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan
		400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
		400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
		400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
		400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
		400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan	
		400.12.5.1	Kuantitas Penduduk

		400.12.5.2	Kualitas Penduduk
		400.12.5.3	Mobilitas Penduduk
		400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
		400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
	400.12.6	Penyerasian Kependudukan	
		400.12.6.1	Indikator Kependudukan
		400.12.6.2	Proyeksi Penduduk
		400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan
		400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
		400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
400.13	KELUARGA BERENCANA		
	400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
		400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data
		400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan
	400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
		400.13.3.1	Penyiapan fasilitas
		400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan
	400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk	
		400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk
		400.13.4.2	Evaluasi
	400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk	
		400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter
		400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter
	400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk	
		400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi
		400.13.6.2	Pemanfaatan parameter
	400.13.7	Pengembangan Sistem	
		400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
		400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.8	Pengembangan Materi	
		400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
		400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.9	Monitoring dan Evaluasi	
		400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
		400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.10	Analisis Sosial	
	400.13.11	Analisis Ekonomi	
	400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	
	400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
	400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	

	400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
	400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
	400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
	400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
	400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
	400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
	400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria
	400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
	400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
	400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
	400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
	400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
	400.13.26	Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak
	400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
	400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
	400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
	400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
	400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
	400.13.28	Pelebagaan bina ketahanan remaja
	400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
	400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
	400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
	400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja
	400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja

400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan		
	400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	
	400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	
	400.13.31	Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
		400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
		400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
		400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
		400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	
	400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	
	400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga	
		400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
		400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
	400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	
400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera		
400.13.38	Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		
	400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
	400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		
	400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
	400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
400.13.40	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi		
	400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	
	400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	
400.13.41	Advokasi dan pencitraan		
400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi		
	400.13.42.1	Promosi	
	400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi	
	400.13.42.3	Produk media komunikasi	
400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi		
400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota		
	400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	

	400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.45	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah	
	400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
	400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400.13.46	Tenaga Lini Lapangan	
	400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan
	400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini
400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan	
	400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
	400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan	
	400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
	400.13.48.1	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan	
	400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
	400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data	
400.13.51	Analisis dan evaluasi	
	400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
	400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data	
	400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi
	400.13.52.2	Pengelolaan bank data
400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi	
	400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
	400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi	
	400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan
	400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
400.14	HUBUNGAN MASYARAKAT	
400.14.1	Keprotokolan	
	400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
	400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan
	400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
	400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat	
400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing,	

		dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media
	400.14.4	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
	400.14.4.1	Kliping Koran
	400.14.4.2	Brosur /Leaflet/poster /plakat
	400.14.4.3	Pengumuman /pemberitaan
	400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
	400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
	400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
	400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
	400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapangan (PKL)
	400.14.5.5	Forum Kehumasan
	400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
	400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD
	400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
	400.14.8	Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal
	400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
	400.14.10	Pameran /sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan
	400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan
	400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf
<b>500</b>	<b>PEREKONOMIAN</b>	
	<b>500.1</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>
	500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
	500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	500.1.2.1	Ketersediaan Pangan
	500.1.2.2	Akses Pangan
	500.1.2.3	Kerawanan Pangan
	500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan
	500.1.3.1	Distribusi Pangan
	500.1.3.2	Harga Pangan
	500.1.3.3	Cadangan Pangan
	500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
	500.1.4.1	Konsumsi Pangan
	500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan
	500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar
	500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
	500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan
	500.1.5.2	Penghargaan Ketahan Pangan
	500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
	500.1.7	Bimbingan Teknis
	500.1.8	Evaluasi
	<b>500.2</b>	<b>PERDAGANGAN</b>
	500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri

	500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
	500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdagangan
	500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
	500.2.2.4	Informasi Perusahaan
	500.2.2.5	Pelaku Pasar
	500.2.2.6	Iklm Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
	500.2.2.14	Informasi Pasar
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
	500.2.2.16	Barang Strategis
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
	500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
	500.2.3.4	Tata usaha
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
	500.2.3.11	Jasa
	500.2.3.12	Kerjasama
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
	500.2.3.14	Kelembagaan dan penilaian
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
	500.2.3.16	Pengawasan
	500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
	500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi
	500.2.4.1	Pengkajian pasar
	500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
	500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
	500.2.4.4	Pengkajian pasar
	500.2.4.5	Pengembangan Pasar
	500.2.4.6	Sistem informasi

		500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
		500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
		500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
	500.2.5	Bimbingan Teknis	
	500.2.6	Evaluasi	
500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
	500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM	
		500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
		500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
		500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
		500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
	500.3.3	Produksi	
		500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
		500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
		500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
		500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
	500.3.4	Pembiayaan	
		500.3.4.1	Program Pendanaan
		500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
		500.3.4.3	Urusan Permodalan
		500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
		500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
		500.3.4.6	Lembaga
	500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha	
		500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
		500.3.5.2	Ekspor dan Impor
		500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
		500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
		500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
		500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
	500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
		500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
		500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
		500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
		500.3.6.5	Advokasi
	500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
		500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
		500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
		500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
		500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
		500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
	500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK	
		500.3.8.1	Penelitian Koperasi

		500.3.8.2	Penelitian UKM	
		500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	
		500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK	
	500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga		
	500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)		
		500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan	
		500.3.10.2	Sarana dan Prasarana	
	500.3.11	Monitoring dan Evaluasi		
500.4	KEHUTANAN			
	500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.4.2	Penyuluhan		
		500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan	
		500.4.2.2	Materi Penyuluhan	
		500.4.2.3	Program Penyuluhan	
		500.4.2.4	Sarana Penyuluhan	
		500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan	
		500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan	
		500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat	
		500.4.2.8	Deseminasi	
		500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan	
	500.4.3	Planologi Kehutanan		
		500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan	
		500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan	
		500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan	
		500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan	
		500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	
		500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan	
		500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	
		500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan	
		500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan	
			500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
			500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
			500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
			500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
		500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
		500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	
		500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	
	500.4.4	Bina Usaha Kehutanan		
		500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK	
		500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK	
		500.4.4.3	Kerjasama	
		500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan	
		500.4.4.5	Perpanjangan	
		500.4.4.6	Modal dan Peralatan	
		500.4.4.7	Investasi Industri	
		500.4.4.8	Peralatan	
		500.4.4.9	Tenaga Kerja	

		500.4.4.10	Pemegang Saham
		500.4.4.11	Neraca Perusahaan
		500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
		500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
		500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
		500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
		500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
		500.4.4.17	Produksi Kayu
		500.4.4.18	Produksi non kayu
		500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
		500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
		500.4.4.21	Industri Non Kayu
		500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
		500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
		500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
		500.4.4.25	Pemblokiran
		500.4.4.26	Denda
		500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
		500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
		500.4.4.29	Penataan
		500.4.4.30	Informasi
		500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
		500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
		500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
		500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
		500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
		500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
		500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
		500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
		500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
		500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
		500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
		500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
		500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
		500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
		500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
		500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
		500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
		500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
		500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
	500.4.5		Standardisasi dan Lingkungan
		500.4.5.1	Standardisasi
		500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan

		500.4.5.3	Pengembangan
		500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
		500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
		500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
		500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
		500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
		500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
		500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
		500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
	500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
		500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
		500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
		500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
		500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
		500.4.6.5	Kawasan Konservasi
		500.4.6.6	Pengamanan Hutan
		500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
		500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
		500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
		500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
		500.4.6.11	Bina Cinta Alam
		500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
		500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
	500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	
		500.4.7.1	Pengelolaan Benih
		500.4.7.2	Kebun Benih
		500.4.7.3	Tegakan Benih
		500.4.7.4	Pengadaan Benih
		500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
		500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
		500.4.7.7	Pembibitan
		500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
		500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
		500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
		500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
		500.4.7.14	Perhutanan Sosial
		500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
	500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
		500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
		500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
		500.4.8.3	Diseminasi
		500.4.8.4	Gelar Teknologi
		500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN		

	500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.5.2	Perikanan Tangkap
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.12	Kelembagaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.3	Perikanan Budidaya
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenuhan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
	500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2	Pengembangan Produk
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri

		500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
		500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
		500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
		500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
		500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
		500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
		500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
		500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
		500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
		500.5.4.18	Pengembangan Impor
		500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
		500.5.4.20	Pelayanan Usaha
		500.5.4.21	Kemitraan Usaha
		500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
		500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
		500.5.4.24	Informasi dan Promosi
	500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
		500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
		500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
		500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
		500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
		500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
		500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
		500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
		500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
		500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
		500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
		500.5.6.12	Pengawasan Kapal Pengawas
		500.5.6.13	Sistem Pemantauan
		500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
		500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
		500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
		500.5.6.17	Penyidikan
		500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
		500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
		500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
	500.5.7	Karantina Ikan	
		500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
		500.5.7.2	Penahanan
		500.5.7.3	Pengasingan
		500.5.7.4	Pengamatan
		500.5.7.5	Pengakuan

		500.5.7.6	Penolakan
		500.5.7.7	Pemusnahan
		500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
		500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
		500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
		500.5.7.11	Pemasukan Formulir
		500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
		500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
		500.5.7.14	Surat Perintah
		500.5.7.15	Rekomendasi
		500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
		500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
		500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
		500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
		500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
		500.5.7.21	Lokasi Karantina
500.6	PERTANIAN		
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.6.2	Perlindungan hortikultura	
		500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
		500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
		500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
		500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura	
		500.6.3.1	Penilaian Varietas
		500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
		500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
		500.6.4.1	Basis Data Lahan
		500.6.4.2	Pengendalian Lahan
		500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
		500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
		500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
		500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
		500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
		500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
500.6.6	Kelembagaan		
	Pembiayaan Pertanian		
	500.6.6.1	Pembiayaan Program	
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis	
500.6.7	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis	
	Pupuk Pestisida		
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah	
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik	
	500.6.7.3	Pestisida	
		500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida

	500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
		500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
		500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
		500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
		500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
		500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
		500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
		500.6.9.4	Kelembagaan Benih
	500.6.10	Budidaya Serealia	
		500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
		500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
		500.6.10.3	Jagung
		500.6.10.4	Serealia Lain
	500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
		500.6.11.1	Kedelai
		500.6.11.2	Ubi Kayu
		500.6.11.3	Aneka Kacang
		500.6.11.4	Aneka Umbi
	500.6.12	Tanaman Pangan	
500.6.12.1		Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	
500.6.12.2		Dampak Perubahan Iklim	
500.6.12.3		Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	
500.6.12.4		Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan		
	500.6.13.1	Padi	
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia lain	
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang	
	500.6.13.4	Aneka Umbi	
500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian		
	500.6.14.1	Tanaman Pangan	
	500.6.14.2	Hortikultura	
	500.6.14.3	Perkebunan	
	500.6.14.4	Peternakan	
500.6.15	Mutu dan Standarisasi		
	500.6.15.1	Standardisasi	
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan	
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi	
500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi		
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan	
	500.6.16.2	Investasi	
	500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri	
	500.6.16.4	Promosi Luar Negeri	
500.6.17	Pemasaran Domestik		
	500.6.17.1	Informasi Pasar	
	500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	

	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500.6.20	Diseminasi	
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian	
	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
	500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	
500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	
500.6.26	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	
	500.6.26.1	Hak Cipta
	500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
	500.6.26.3	Hak Paten Biasa
	500.6.26.4	Hak Merek
	500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
	500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
	500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian	
	500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
	500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
	500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
500.6.28	Pelayanan Hukum	
	500.6.28.1	Sertifikasi
	500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
500.6.29	Karantina Pertanian	
	500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
	500.6.29.2	Karantina Hewan
500.6.30	Bimbingan Teknis	
500.6.31	Evaluasi	
500.7	PETERNAKAN	
	500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan

		500.7.2.1	Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
		500.7.2.2	Pakan Ternak
		500.7.2.3	Budidaya Ternak
		500.7.2.4	Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
		500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
	500.7.3	Bimbingan Teknis	
	500.7.4	Evaluasi	
500.8	PERKEBUNAN		
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.8.2	Tanaman Semusim	
		500.8.2.1	Identifikasi Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
		500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim
		500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
		500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
	500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar	
		500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
		500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
		500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
		500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.4	Tanaman Tahunan	
		500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
		500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
		500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan
		500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
	500.8.5	Perlindungan Perkebunan	
		500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
		500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar

		500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
		500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
	500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha	
		500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
		500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
		500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
		500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
	500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	
	500.8.8	Evaluasi Perkebunan	
500.9	PERINDUSTRIAN		
	500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama	
		500.9.2.1	Industri Manufaktur
		500.9.2.2	Industri Agro
		500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.3	Promosi Industri	
		500.9.3.1	Industri Manufaktur
		500.9.3.2	Promosi Industri Agro
		500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.4	Standarisasi dan Teknologi	
		500.9.4.1	Industri Manufaktur
		500.9.4.2	Industri Agro
		500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.5	Hak dan Kekayaan Intelektual	
		500.9.5.1	Industri Manufaktur
		500.9.5.2	Industri Agro
		500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.6	Industri Hijau	
		500.9.6.1	Industri Manufaktur
		500.9.6.2	Industri Agro
		500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	
	500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	
	500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	
	500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	
	500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	
	500.9.12	Standarisasi	
		500.9.12.1	Standar
		500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
		500.9.12.3	Infrastruktur Standar

	500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri		
		500.9.13.1	Kebijakan Industri	
		500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif	
	500.9.14	500.9.13.3		Pengembangan Model Industrial
		Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup		
		500.9.14.1	Industri Hijau	
		500.9.14.2	Lingkungan Hidup	
	500.9.15	500.9.14.3		Energi
		Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual		
		500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	
		500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	
	500.9.16	500.9.15.3		Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
		Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri		
	500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
		500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.10.2	Rekomendasi Kegeologian	
500.10.2.1			Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	
500.10.2.2			Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	
500.10.2.3			Pertambangan	
500.10.2.4			Panas Bumi	
500.10.2.5			Geosains	
500.10.2.6			Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	
500.10.2.7			Kelayakan Lingkungan	
500.10.3		Penelitian Kegeologian		
		500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian	
		500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian	
		500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian	
		500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	
		500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	
		500.10.3.6	Sumber Daya Geologi	
		500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	
		500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	
		500.10.3.9	Survei Geologi	
500.10.4		Inventarisasi dan evaluasi kegeologian		
	500.10.4.1	Sumber Daya Geologi		
	500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi		
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan		
	500.10.4.4	Survei Geologi		
	500.10.4.5	Konservasi		
500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi			
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran		
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan		
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara		

	500.10.5.4	Survei Geologi
500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
	500.10.6.4	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
500.10.7.1		Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
500.10.7.2		Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
500.10.7.3		Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
500.10.7.4		Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
500.10.7.5		Perpanjangan Kontrak KKS
500.10.7.6		Penetapan Alokasi dan Harga Gas
	500.10.7.7	Partisipasi Interest
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman

			dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan
		500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
		500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
	500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
		500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
		500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
		500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
		500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
		500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
		500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
		500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
		500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah, Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
		500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
		500.10.9.10	Usaha penunjang
	500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
		500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi

	500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
	500.10.12	Panas Bumi
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specification (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
	500.10.12.8	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
	500.10.13	Bioenergi
500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	
500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	
500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	
500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	
500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN	
500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi	
500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	
500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	
500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	

500.10.14	Aneka Energi		
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha	
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	
	500.10.15	Konservasi Energi	
		500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
		500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energy
		500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
		500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
500.10.15.5		Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	
500.10.15.6		Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	
500.10.15.7		Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energy	
500.10.15.8		Profil investasi efisiensi energi	
500.10.15.9		Invesment Grade Audit (IGA)	
500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE		
500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE		
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja	
500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik		
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan	
		tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik	
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu	
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan	
500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistrikan		
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan	

			Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin
		500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
		500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
		500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
	500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
		500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
		500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
		500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
		500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
	500.10.20	Sertifikasi	
		500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
		500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
		500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
		500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
		500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
	500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	
	500.10.22	Standarisasi Kompetensi	
	500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
		500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
		500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
		500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
		500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
		500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan

		500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
		500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
		500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
		500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
	500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara	
		500.1.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
		500.1.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
		500.1.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerjasama Bidang Mineral dan Batubara
		500.1.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
		500.1.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
		500.1.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
		500.1.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
		500.1.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
		500.1.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
	500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
		500.10.26.1	Ketenagakerjaan
		500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
		500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
		500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
		500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
		500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
		500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
		500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
		500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
		500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
		500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
		500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
		500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
		500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
		500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
		500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
		500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
	500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
		500.10.27.1	Ketenagakerjaan
		500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
		500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara

	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
	500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
	500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
	500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.12	Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
	500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
	500.10.28	Penerimaan Negara
	500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
	500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
	500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional
	500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
	500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
	500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan

	500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
	500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
	500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
	500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/ Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
	500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL- 5) pelaksanaan reklamasi
	500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
	500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
	500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
	500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
	500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
	500.10.29.16	Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
	500.10.29.17	Pengawasan Teknis
	500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
	500.10.29.19	Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis
	500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan
	500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
	500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
	500.10.30.3	Dokumen penerapan/ pemanfaatan/ pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan /inovasi
	500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
	500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

		500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
		500.10.30.11	Forum pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
		500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
	500.10.31	Sarana Litbang	
		500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
		500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
	500.10.32	Afiliasi	
		500.10.32.1	Proyek Percontohan
		500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
		500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
		500.10.32.4	Penyajian Informasi
	500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
	500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
		500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
		500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
		500.10.34.3	Laboratorium
		500.10.34.4	Study
		500.10.34.5	Teknologi Proses
		500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
		500.10.34.7	Teknologi Gas
	500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
		500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
		500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
		500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara
	500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	
		500.10.36.1	Energi baru terbarukan
		500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
		500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
		500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi
500.11	PERHUBUNGAN		
	500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan	
		500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
		500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
		500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama
		500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal

	500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
	500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
	500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer
	500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
	500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan	
	500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan
500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor	
	500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
	500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor	
	500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
	500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
	500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
	500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
	500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
	500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
500.11.7	Perlengkapan Jalan	
	500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
	500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
	500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
500.11.8	Angkutan Penumpang	
	500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
	500.11.8.7	Angkutan perintis
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
500.11.9	Angkutan Barang	

	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
500.11.10	Monitoring Operasional	
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	500.11.11.1	Pedoman Teknis
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.11.11.3	Bimtek PPNS
	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
	500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.21	Tarif dan Keperintisan	
	500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

	500.11.22	500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
		Bina Sistem Transportasi Perkotaan	
		500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
		500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
		500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan	
		500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
		500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
		500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
	500.11.24	Angkutan Perkotaan	
		500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
		500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan
		500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	
		500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
		500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.25.3		Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	
500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan		
	500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	
	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	
	500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	
	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	
	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	
	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan	
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan		
	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	
	500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian	

		500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
		500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
		500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
	500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	
		500.11.29.1	Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	
		500.11.30.1	Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
		500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
	500.11.31	Audit Keselamatan	
		500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
		500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
	500.11.32	Inspeksi Keselamatan	
		500.11.32.1	Pedoman keselamatan
		500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
	500.11.33	Parkir	
		500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
		500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
		500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.12.2	Telekomunikasi	
		500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
		500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
		500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
		500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi

	500.12.3	Penyiaran		
		500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	
		500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	
	500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal		
		500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	
		500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	
		500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	
		500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	
		500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur	
	500.12.5	Pengendalian Informatika		
		500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	
		500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	
		500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	
		500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban	
	500.12.6	e- Government		
		500.12.6.1	Tata Kelola e-Government	
		500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e- Government	
		500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government	
		500.12.6.4	Aplikasi Layanan Pemerintahan	
500.12.6.5		Aplikasi Layanan Publik		
500.12.7	e- Business			
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business		
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e- Business		
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business		
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business		
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat			
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan		
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan		
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika			
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika		
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna		
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak		
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia		
500.12.10	Keamanan Informasi			
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi		
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi		
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi		
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan		

		500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
	500.12.11	Komunikasi Publik	
		500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
		500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
		500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
	500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
		500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
		500.12.12.2	Informasi Perekonomian
		500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
	500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
		500.12.13.1	Media Cetak
		500.12.13.2	Media Online
		500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
	500.12.14	Kemitraan Komunikasi	
		500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
		500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
		500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
	500.12.15	Infrastruktur Informatika	
		500.12.15.1	Jaringan
		500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
		500.12.15.3	Keamanan Informatika
	500.12.16	Sistem dan Data	
		500.12.16.1	Portal dan Konten
		500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
		500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi
	500.12.17	Pusat Kerjasama	
		500.12.17.1	Kerja Sama daerah
		500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral
	500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	
		500.12.18.1	Pelayanan Informasi
		500.12.18.2	Hubungan Masyarakat
		500.12.18.3	Bimbingan Teknis
	500.12.19	Evaluasi	
500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
	500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata	
		500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
		500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
		500.13.2.3	Industri Pariwisata
		500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
		500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
	500.13.3	Pemasaran Pariwisata	
		500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata

		500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
		500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
		500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
	500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	
		500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
		500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
		500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
	500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK	
		500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
		500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
		500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi
	500.13.6	Pengembangan	
		500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
		500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan
		500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
		500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.14	STATISTIK		
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi	
		500.14.2.1	Perencanaan
		500.14.2.2	Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
		500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
		500.14.2.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
		500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
		500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus

	500.14.3	Survei
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas
	500.14.3.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan
	500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei
	500.14.4	Konsolidasil Data Statistik
	500.14.4.1	Kompilasi Data
	500.14.4.2	Analisis data
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
	500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik
	500.15	KETENAGAKERJAAN
500.15.1		Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja
	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
	500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
	500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
	500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta

		500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
		500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
	500.15.6	Bina Pemagangan	
		500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
		500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
		500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
		500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
	500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
		500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
		500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
		500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
		500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
	500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja	
		500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
		500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
		500.15.8.3	Bursa Kerja
		500.15.8.4	Analisis Jabatan
	500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		500.15.9.1	Antar Kerja
		500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
		500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
		500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
	500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	
		500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal
		500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
		500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
		500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
	500.15.11	Standardisasi Profesi	
		500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
		500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
	500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	
		500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
		500.15.12.2	Perjanjian Kerja
		500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
		500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
	500.15.13	Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial	
		500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
		500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
		500.15.13.3	Pemasarakatan Hubungan Industrial
	500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
		500.15.14.1	Pengupahan
		500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja

500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	
	500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	
	500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
	500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
	500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
	500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
	500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
	500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
	500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
	500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	
500.15.20	Bina Penegakan Hukum	
	500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
	500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3
	500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3
	500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
	500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
	500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

		500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
		500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
		500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
500.16	PENANAMAN MODAL			
	500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal		
		500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	
		500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur	
		500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan	
		500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur	
	500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
		500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal	
		500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah	
		500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha	
		500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	
		500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	
		500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	
	500.16.4	Promosi Penanaman Modal		
			500.16.4.1	Pengembangan Promosi
			500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
			500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
			500.16.4.4	Promosi Sektoral
			500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
			500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
500.16.5		Kerja Sama Penanaman Modal		
		500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	
		500.16.5.2	Kerja Sama Regional	
		500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	
500.16.6		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
		500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal	
		500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal	
		500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	
		500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	
		500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal	
		500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	
500.16.7		Pelayanan Penanaman Modal		
	500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi		
	500.16.7.2	Pelayanan Perijinan		
	500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan		
	500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan		
	500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas		

500.17	PERTANAHAN			
	500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan		
		500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	
		500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	
		500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan	
		500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian	
	500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah		
		500.17.3.1	Penatagunaan Tanah	
		500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik	
		500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah	
	500.17.4	Sengketa Tanah		
		500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa	
500.17.4.2		Advokasi dan Pengendalian		
500.18	TRANSMIGRASI			
	500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi		
		500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	
		500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah	
		500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan	
	500.18.2.4	Advokasi Pertanahan		
		500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	
			500.18.3.1	Penyiapan Lahan
			500.18.3.2	Penyiapan Sarana
	500.18.3.3		Penyiapan Prasarana	
	500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman		
		500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	
			500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi
			500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan
	500.18.4.3		Pelaksanaan Perpindahan	
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi		
		500.18.5	Partisipasi Masyarakat	
			500.18.5.1	Promosi dan Motivasi
			500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan
	500.18.5.3		Kerjasama Antar Daerah	
500.18.5.4	Pelayanan Investasi			
	500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi		
		500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	
		500.18.6.2	Bina Sistem Informasi	
500.18.6.3		Perencanaan Pengembangan Kawasan		
500.18.6.4		Perencanaan Pengembangan Masyarakat		
500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan			
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat			
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan		
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya		
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan		

		500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
	500.18.8	Pengembangan Usaha	
		500.18.8.1	Kewirausahaan
		500.18.8.2	Produksi
		500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
		500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan
	500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	
		500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
		500.18.9.2	Pengembangan Sarana
		500.18.9.3	Pengembangan Prasarana
		500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
	500.18.10	Penyerasian Lingkungan	
		500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
		500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
		500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
		500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN		
600.1	PEKERJAAN UMUM		
	600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air	
		600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai
		600.1.2.2	Kelembagaan
		600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air
		600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
		600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan
	600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	
		600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
		600.1.3.2	Manajemen Mutu
		600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
		600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
	600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air	
		600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
		600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
		600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
		600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
		600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
		600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
		600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
		600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan	
		600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
		600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
		600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
	600.1.8	Pembangunan Jalan	
		600.1.8.1	Standar dan Pedoman

		600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
		600.1.8.3	Pengelolaan Gedometri, Perkerasan, dan Drainage
		600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
	600.1.9	Preservasi Jalan	
		600.1.9.1	Standar dan Pedoman
		600.1.9.2	Perencanaan Teknis
		600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
		600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
	600.1.10	Pengelolaan Jembatan	
		600.1.10.1	Standar dan Pedoman
		600.1.10.2	Perencanaan Teknis
		600.1.10.3	Teknik Jembatan
		600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
	600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
		600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
		600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
		600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
	600.1.12	Pengaturan Jalan Tol	
		600.1.12.1	Persiapan perusahaan jalan tol
		600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
		600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
		600.1.12.4	Pengambilalihan hak perusahaan jalan tol
	600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	
		600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
		600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
	600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman	
		600.1.14.1	Perencanaan Teknis
		600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
		600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
		600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
		600.1.14.5	Kelembagaan
	600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan	
		600.1.15.1	Perencanaan Teknis
		600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
		600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
		600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
		600.1.15.5	Kelembagaan
	600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		600.1.16.1	Perencanaan Teknis
		600.1.16.2	Sistem
		600.1.16.3	Sistem
		600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
		600.1.16.5	Kelembagaan
		600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
		600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
	600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	
		600.1.17.1	Perencanaan Teknis
		600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah

		600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
		600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
		600.1.17.5	Kelembagaan
		600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
	600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi	
600.2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan	
		600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
		600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
		600.2.2.3	Kemitraan
	600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan	
		600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
		600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
		600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
	600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	
		600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
		600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
		600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
		600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
		600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
	600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan	
		600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
		600.2.5.2	Analisa Teknik
		600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
600.2.5.4		Kemitraan dan Kelembagaan	
600.2.6	Penyediaan Rumah Susun		
	600.2.6.1	Perencanaan Teknik	
	600.2.6.2	Penyediaan	
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	
	600.2.6.4	Pengelolaan	
600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus		
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik	
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	
	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi	
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik	
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan	
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial		
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik	
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum	
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang	
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	
600.2.9	Investasi Infrastruktur		
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	

	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
	600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
	600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi	
	600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
	600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi	
	600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
	600.2.15.2	Pengembangan Materi
	600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)	
	600.2.16.1	Antar Sektor
	600.2.16.2	Antar Wilayah
600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis	
	600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
	600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan	
	600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
	600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
	600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
	600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
	600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi	

600.3	<b>TATA RUANG (TATA KOTA)</b>		
	600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	
	600.3.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
		600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
		600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
		600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
		600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
		600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
		600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
	600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota	
	600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian	
		600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
		600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
	600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	
	600.3.4	Pemetaan	
		600.3.4.1	Peta Dasar
		600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
600.3.4.3		Survey Pemetaan Ruang Air	
600.3.4.4		Survey Pemetaan Ruang Udara	
600.4	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>		
	600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
		600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
		600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
		600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
		600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
	600.4.4	Ekonomi Lingkungan	
	600.4.5	Dampak Lingkungan	
		600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
		600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
		600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
	600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan	
		600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
		600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
		600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
		600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
	600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan	
		600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
600.4.7.2		Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	
600.4.7.3		Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	
600.4.7.4		Udara Sumber Bergerak	
600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan		

	600.4.8.1	Pengembangan
	600.4.8.2	Pemanfaatan
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
	600.4.8.4	Keamanan Hayati
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
	600.4.9.2	Rawa
600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer	
	600.4.10.1	Perangkat mitigasi
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim	
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun	
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	
	600.4.14.1	Pemantauan
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
600.4.15	Pengelolaan Sampah	
	600.4.15.1	Pembatasan sampah
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan	
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan	
	600.4.18.1	Penyidikan
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19	Komunikasi Lingkungan	
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat	

		600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
		600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
	600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat	
		600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
		600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
	600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	
		600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
		600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
	600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan	
		600.4.23.1	Pengelolaan Data
		600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
		600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
		600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
	600.4.24	Kelembagaan Lingkungan	
		600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
		600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
	600.4.25	Standarisasi dan teknologi	
		600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
		600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
		600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan
	600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan	
		600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
		600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian
700	PENGAWASAN		
700.1	PENGAWASAN INTERNAL		
	700.1.1	Rencana Pengawasan	
		700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
		700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
		700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
		700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
		700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
	700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan	
		700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
		700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
		700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
		700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
		700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
		700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
		700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

		700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
		700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)
<b>800</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>		
<b>800.1</b>	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
	<b>800.1.1</b>	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	
	800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan	
	800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	
	800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	
		800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
	<b>800.1.2</b>	Formasi dan Pengadaan Pegawai	
	800.1.2.1	Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus	
	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN	
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN	
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN	
	800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)	
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	
	<b>800.1.3</b>	Mutasi Pegawai	
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN	
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungs	
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja	
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	
	<b>800.1.4</b>	Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus /Magang/Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain /Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah	
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier	

800.1.5	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
800.1.7	Bantuan Hukum	
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorar
800.1.11	Administrasi Pegawai	
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan

	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
	800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13	Administrasi Perseorangan	
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah
	800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
800.1.14	Penilaian Kompetensi	
	800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
	800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan	
	800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
	800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
	800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
	800.2.2.4	Modul-modul diklat
	800.2.2.5	Panduan fasilitator
	800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
	800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
	800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
	800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
800.2.3	Widyaiswara	
	800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
	800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
	800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
	800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
	800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
	800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
800.2.4	Penyelenggaraan Diklat	

		800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
		800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
		800.2.4.5	Sistem informasi diklat
		800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
		800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
	800.2.5	Alumni	
900	KEUANGAN		
900.1	KEUANGAN DAERAH		
900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)		
900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)		
900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)		
900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan		
900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)		
900.1.2	Penyusunan Anggaran		
900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan		
900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota		
900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah		
900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran		
900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS		
900.1.3.2	Pendapatan		
900.1.3.3	Belanja		
900.1.3.4	Pembiayaan Daerah		
900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan		
900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana		
900.1.3.7	Daftar Gaji		
900.1.3.8	Kartu Gaji		
900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)		
900.1.3.10	Laporan Keuangan		
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri		
900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)		
900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)		

		900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
		900.1.4.4	Dokumen Loan Agreement (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
		900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
		900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
		900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
		900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan
			Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
		900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),
		900.1.4.10	Staff Appraisal Report
		900.1.4.11	Report /Laporan
		900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
		900.1.4.13	Completion Report/Annual Report
		900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
	900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
	900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
		900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
		900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
		900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
		900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
	900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	
		900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
		900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
		900.1.7.3	Buku Rekening Bank
		900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
		900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran

	900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	
	900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan	
		Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	
	900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	
	900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	
	900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	
	900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	
	900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	
	900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah	
	900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	
	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	
	900.1.12	Anggaran Daerah	
	900.1.12.1	Anggaran Daerah	
	900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	
	900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah	

		900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
		900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
		900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
		900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
		900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
	900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan	
		900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
		900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

	900.1.15	900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
		900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya
		900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
		Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	
		900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
		900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
		900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
		900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
		900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

  
RIADQA PRIAMBODO, SH  
NIP. 19820929 200501 1 006

BUPATI GROBOGAN,  
Cap ttd.  
SRI SUMARNI